

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PERKARA HARTA WARIS
YANG TELAH DI HIBAHKAN
(Studi Putusan Nomor : 0425/Pdt.G/2018/PA.Gsg dan
Putusan Banding Nomor : 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl)**

SKRIPSI

Diajukan untuk penulisan Skripsi
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :
M. YUSUF RAMADHANI
NPM.1621010026



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PERKARA HARTA WARIS
YANG TELAH DI HIBAHKAN
(Studi Putusan Nomor : 0425/Pdt.G/2018/PA.Gsg dan
Putusan Banding Nomor : 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl)**

SKRIPSI

Oleh

**M. YUSUF RAMADHANI
NPM.1621010026**

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. KH. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II: Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan penulis jelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang penulis maksud. Judul penelitian yang dibahas adalah: “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Terhadap Perkara Harta Waris yang telah di Hibahkan (Studi Putusan Nomor :0425/Pdt.G/2018/PA.Gsg dan Putusan Banding Nomor : 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl)”. Adapun maksud dan pengertiannya, dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

1. Disparitas
Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.¹
2. Putusan
Putusan adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.²
3. Harta Waris
Harta Waris yang dalam istilah peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.³
4. Hibah
Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.⁴

¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) dan penjelasannya

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 169.

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 36.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi I, Cet. V, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 210

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkap dan menganalisis disparitas putusan terhadap perkara harta waris yang telah di hibahkan (Studi Putusan Nomor : 0425/Pdt.G/2018/PA.Gsg dan Putusan Banding Nomor : 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl).

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Alasan objektif dari penelitian ini adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai disparitas, mulai dari pengertian, pemahaman dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan.

2. Alasan Subjektif

Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tempuh sebagai mahasiswa di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang meliputi hukum keluarga di mana harta warisan dan hibah adalah bagian dari kajian perkuliahan.

C. Latar Belakang Masalah

Hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut pinjaman⁵.

Hibah disyariatkan dan dihukumisunah dalam Islam. Dan Ayat ayat Al-Qur'an maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya, dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah:2:

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, Cet. XX, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 174.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا أَلْقَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
 أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (المائدة : ٢)

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S. Al-Maidah [5]:2)⁶

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Hadis*, (Bandung:Cordoba, 2013), h. 106.

nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷

Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.⁸ Dalam praktik peradilan perdata dikenal sumber hukum berupa *burgerlijk wetboek* (BW) yang terdiri dari 1993 pasal. BW tersebut berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 (amandemen) masih berlaku hingga saat ini. BW berlaku untuk sebagian warganegara Indonesia yaitu : a) mereka yang termasuk golongan Eropa; b) mereka yang termasuk golongan Tionghoa dengan beberapa kekecualian dan tambahan seperti termuat dalam Lembaran Negara tahun 1917(lampiran I); dan c) mereka yang termasuk golongan Timur Asing selain daripada Tiong Hoa dengan kekecualian dan penjelasan seperti termuat dalam Lembaran Negara tahun 1924(lampiran II).⁹

Sementara itu untuk golongan Bangsa Indonesia Asli berlaku hukum adat yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat. BW ditulis menggunakan bahasa Belanda dan hingga saat ini tidak terdapat terjemahan resmi dari Pemerintah Indonesia yang dapat memberikan keseragaman terjemahan yang dapat di gunakan dalam penerapannya.

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 146.

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. Pradnya Paramitha, 2004), h. vi-vii.

Namun permasalahan disparitas putusan ditemukan pada perkara harta waris yang telah di hibahkan Nomor : 0425/Pdt.G/2018/PA.Gsg dan Putusan Banding Nomor : 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl yang mana pada tingkat pertama pihak tergugat yakni Febrian Erlangga tidak di menangkan oleh majelis hakim karena tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang diperlukan selama persidangan. Namun karena merasa tidak puas Febrian Erlangga melanjutkan perkara ini pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan ia mampu menghadirkan bukti-bukti yang di perlukan hingga dimenangkan oleh majelis hakim tingkat banding.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai perkara Disparitas Putusan dalam bentuk sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan meninjau atau menganalisis putusan Nomor :0425/Pdt.G/2018/PA.Gsg dan Putusan Banding Nomor :0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl Untuk itu penulis mengangkat sebuah judul Disparitas Putusan Pengadilan Agama terhadap Perkara Harta Waris yang telah di Hibahkan (Studi Putusan Nomor : 0425/Pdt.G/2018/PA.Gsg dan Putusan Banding Nomor : 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl).

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana analisis hukum Islam terhadap Disparitas Putusan Pengadilan Agama terhadap Perkara Harta Waris yang telah di Hibahkan (Studi Putusan Nomor :0425/Pdt.G/2018/PA.Gsg dan Putusan Banding Nomor : 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkara harta waris yang telah dihibahkan terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Perkara Nomor : 0425 / Pdt.G /2018 /PA.Gsg?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim banding dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkara harta waris yang telah dihibahkan terhadap Putusan Banding Nomor : 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl ?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkara harta waris yang telah di hibahkan terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Perkara Nomor :0425/Pdt.G/2018/PA.Gsg.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim Banding dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkara harta waris yang telah di hibahkan terhadap Putusan Banding Nomor : 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai disparitas putusan terhadap perkara harta waris yang telah di hibahkan.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman disparitas putusan terhadap perkara harta waris yang telah di hibahkan
3. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode adalah keharusan dalam sebuah penelitian agar validitas data bisa dicapai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; focus dan multi metode; bersifat alami dan

holistik; mengutamakan kualitas; menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.¹⁰

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, yaitu bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*).¹¹ Oleh karena itu, bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian. Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, Kamus Hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

b. Jenis Data

Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku-buku, literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Dalam penelitian ini, sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II Mahkamah Agung dan

¹⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.328.

¹¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47.

¹² Ranny Kautur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 0425/Pdt.G/2018/PA.Gsg dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandar Lampung Nomor : 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Majalah, Surat Kabar, Media Cetak dan Media Elektronik.

2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Disparitas Putusan terhadap Perkara Harta Waris yang telah di hibahkan (Studi Putusan Nomor :0425/Pdt.G/2018/PA.Gsg dan Putusan Banding Nomor : 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl).

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya yaitu: metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data yang tertulis yang telah menjadi dokumen atau instansi.¹³ Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis dan Disertasi Jilid 1*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h.9.

legger, agenda, dan sebagainya.¹⁴ Dalam penelitian dokumentasi dengan cara meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 0425/Pdt.G/2018/PA.Gsg dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandar Lampung Nomor : 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl) dan jurnal hukum.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.¹⁵

b. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, Hadis, buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).¹⁶ Catatan atau tanda ditempatkan dibagian dibawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.

c. Sistematisasi Data (*sistemaziting*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah Metode Berfikir Deduktif yaitu suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus.¹⁷ Kaitan dengan penulisan skripsi ini, adalah metode deduktif ini digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data perpustakaan secara umum, dari berbagai buku-buku fikih, hadits dan sebagainya, tentang suatu konsep, teori ataupun pendapat tentang perkara waris

¹⁴ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), h. 202.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.128.

¹⁶ *Ibid*, h.126.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, h.47.

yang telah dihibahkan yang kemudian diambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian yang berkaitan dengan perkara waris yang telah dihibahkan dalam putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 0425/Pdt.G/2018/PA.Gsg dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandar Lampung Nomor :0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Harta Waris Menurut Hukum

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya” yang berwujud: perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Oleh karena itu berbicara tentang masalah pewarisan apabila terdapat:

- a. Ada orang yang meninggal;
- b. Ada harta yang ditinggalkan;
- c. Ada ahli waris.

Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHPdata, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.¹⁸

Amir Syarifuddin merumuskan hukum waris sebagai seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.¹⁹

Eman Suparman menyebutkan bahwa hukum waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perpindahan harta

¹⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 143.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minakabau*, (Jakarta: 1999, Gunung Agung), h. 9.

peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada seorang ahli waris atau lebih.²⁰

R. Soebekti berpendapat bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Sedangkan hukum waris menurut Wirjono Prodjodikoro adalah hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²¹

Menurut Fatchur Rahman untuk terjadinya pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur:

- a. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain;
- b. Ahli waris, adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian;
- c. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.²²

KUHPerdota telah memberikan batasan ataupun syarat-syarat tertentu untuk dapat menjadi seorang ahli waris, yaitu:

- 1) Adanya hubungan darah baik sah atau tidak sah (Pasal 832 KUHPerdota);
- 2) Pemberian melalui surat wasiat (Pasal 874 KUHPerdota);
- 3) Orang yang menjadi ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUHPerdota). Dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya.

Ketentuan Hukum Waris Islam mengenal beberapa istilah waris, hukum waris, pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta waris, wasiat, hibah;

- a. Hukum Waris adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilihan harta peninggalan (tirkah)

²⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dan Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2011), h.12.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1994), h. 68.

²² Fachtur Rahman, *Ilmu Waris Cet ke X*, (Bandung: Al-Maarif, 2014), h. 2-3.

- pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa pembagian masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
 - c. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
 - d. Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda menjadi miliknya maupun hak-haknya.
 - e. Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
 - f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
 - g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²³

Dian Khairul Umam mengatakan bahwa kata waris berasal dari bahasa Arab, bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Secara bahasa, kata *Mawarits* merupakan jamak dari mirats, (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats* yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.” Orang yang meninggalkan disebut *muwarits*. Sedang yang berhak menerima harta waris disebut *warits*.²⁴

Sedangkan menurut KHI, Buku II dalam ketentuan umum poin (a), yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilihan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

²³ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mewaris Untuk IAIN, STIAI, DTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.

²⁴ *Ibid*, h. 15.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan kepada ahli waris dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

2. Dasar Hukum Waris

Menurut Al-Qur'an; berbicara mengenai hukum waris berdasarkan Hukum Islam, harus mengacu kepada satu-satunya sumber hukum tertinggi dalam hal ini adalah Al-Qur'an yang merupakan hal utama pengaturan warisan dalam Islam. Ayat-ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam surat An-Nisaa, surat Al-Baqarah, dan surat Al-Ahzab. Ayat-ayat suci yang berisi tentang ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an, sebagian besar terdapat dalam surat An-Nissa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. QS. An-Nisa: 7;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

b. QS: An-Nisa: 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ

لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ
 كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ
 مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 (dua) anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta, dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika ia meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

c. QS. An-Nisa: 12;

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
 يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا

تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وَإِن كَانَتْ رَجُلٌ
يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْأُشْدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ ذَيْنَ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya :“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak member mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.

d. QS: An-Nisa: 33;

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلَّذِينَ
عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya :“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan Segala sesuatu”.

e. QS: An-Nisa: 176;

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya :“Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu yaitu jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seseorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”³⁵.

Hadis mengenai waris ini antara lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a: “Nabi Muhammad S.A.W. bersabda: “berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama. (HR. Bukhari-Muslim).

³⁵ Fachtur Rahman. *Op. Cit.*, hlm. 33.

3. Syarat-Syarat Waris

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Ada 3 (tiga) rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama, 3 (tiga) syarat tersebut adalah:

- a. Pewaris baik secara *haqiqy*, *hukmy* (misalnya dianggap telah meninggal)
- b. Adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab), atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
- c. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang, tanah.²⁵

Adapun syarat waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. *Muwaris*

Yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang, yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

1) *Mati Haqiqy* (mati sejati)

Mati Haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

²⁵ Faturraman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publisbing, 2004), h. 28.

- 2) *Mati Hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis)
Mati Hukmy (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 (empat) tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain.
- 3) *Mati Taqdiry* (mati menurut dugaan)
Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan yang sangat kuat, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

b. Waris (ahli waris)

Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu, antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.

c. *Al-Mauruts*

Adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan. Baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan.²⁶

4. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id* yang artinya bagian tertentu

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 28.

yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.

Adapun Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam meliputi sebagai berikut :

a. Ahli waris

Menurut Pasal 172 KHI yang disebut ahli waris “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Kemudian menurut Pasal 173 KHI seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- 2) dipersalahkan secara telah melakukan fitnah dan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

b. Kelompok Ahli Waris

Adapun mengenai kelompok ahli waris ditentukan pada Pasal 174 yaitu Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- 1) Menurut hubungan darah:
 - a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - b) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

c. Besarnya Bagian

Adapun mengenai besarnya bagian :

- a. Menurut Pasal 176 KHI dijelaskan bahwa” Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan

anak perempuan. Selanjutnya pada Pasal 177 KHI mengenai bagian yang didapat ayah” ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

b. Menurut Pasal 178 KHI

- a) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- b) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.²⁷

B. Hibah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hibah

Istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Berdasarkan hal itu, maka perlu lebih dahulu dikemukakan definisi atau pengertian hibah dalam pandangan ulama.

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata wahaba digunakan dalam al-Qur’an beserta kata yang lainnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi.²⁸

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.²⁹

Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak.³⁰

²⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 156-157.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 466.

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), h. 540.

³⁰ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Alumni, 2005), h. 217.

Secara bahasa, dalam kamus Al-Munjid, hibah berasal dari akar kata *wahaba- yahabu-hibatan*, berarti memberi atau pemberian. Dalam Kamus Al-Munawwir kata "hibah" ini merupakan *mashdar* dari kata (هَبَ) yang berarti pemberian.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hibah berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.³²

Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya:

- a. Jumhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan hibah adalah yang artinya: "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela". Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Abd al-Rahmân al-Jazirî dalam Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al- Arba'ah, menghimpun empat definisi hibah dari 4 (empat) mazhab, yaitu menurut Mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut Mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.³³
- b. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan oleh mazhab Hambali yang artinya : "Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan".
- c. Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.

³¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1584.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 398.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), h. 82.

- d. Definisi dari Syekh Muhammad Ibn Qâsim al-Ghazzi, bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.
- e. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang.
- f. Di dalam syara³⁴, hibah berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut ‘*âriyatun* (pinjaman).³⁴
- g. Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³⁵
- h. Hibah menurut hukum positif diatur dalam KUHPerdara, hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara yaitu: Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakuihibah di antara orang-orang yang masih hidup.

Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna bahwa hibah merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikit pun.

Guna memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk

³⁴ Sayyid Sadiq, *Fikih Sunnah Jilid 14 (Terjemah)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997), h. 167.

³⁵ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 56.

sahnya suatu pekerjaan”, sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.³⁶

Menurut Satria Effendi dan M. Zein menjelaskan bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu.³⁷

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalâf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara’, yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum.³⁸

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati menjadi unsur bagi sifat yang mensifati.³⁹

Rukun dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu”. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut Ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang

³⁶Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Op. Cit.*, h. 966.

³⁷Satria Effendi dan M. Zein. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 64.

³⁸Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 50.

³⁹Abdul Azis Dahlan. *Op. Cit.*, hlm. 1510.

kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.⁴⁰

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah ada tiga:

- a. Orang yang menghibahkan (*al-wāhib*);
- b. Orang yang menerima hibah (*al-mauhūb lah*);
- c. Pemberiannya (*al-hibah*).⁴¹

Hal senada dikemukakan Abd Al-Rahmân Al-Jazirî, bahwa rukun hibah ada 3 (tiga) macam:

- a. *Aiqid* (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau wāhib dan mauhūb lah;
- b. *Mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta;
- c. *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*.⁴²

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijāb* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), *qabūl* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung). Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada 4 (empat), yaitu :

- a. Orang yang menghibahkan;
- b. Harta yang dihibahkan;
- c. Lafaz hibah;
- d. Orang yang menerima hibah.⁴³

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum. Adapun syarat barang yang boleh dihibahkan adalah:

- a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut

⁴⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 95.

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 244.

⁴² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 63.

⁴³ *Ibid*, h. 75.

ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).

- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.
- c. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp.1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar Fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.
- d. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.⁴⁴

⁴⁴*Ibid*, h. 245-247.

- e. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai penerima hibah

Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya *ijab* dan *qabul* saja, tetapi harus bersamaan denganbolehnya harta itu dikuasai, sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syaratnya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah. *Al-Qabdh* itu sendiri ada 2 (dua) yaitu:

- 1) *Al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
- 2)
- 3) *Al-qabdh* melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada 2 (dua), yaitu:
 - a) Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
 - b) Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu diambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.⁴⁵

⁴⁵Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid III*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 181.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa di antara syarat-syarat hibah yang terkenal ialah penerimaan (*al-qabdh*). Dimana syarat hibah adalah setiap yang boleh dijual boleh pula dihibahkan. Tidak sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan. Syarat sahnya hibah adalah penerimaan. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli. Apabila penerima hibah memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu menderita sakit, maka batal hibah tersebut.

2. Dasar Hukum Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama' fiqh sepakat bahwa hukum hibah adalah sunah, berdasarkan firman Allah SWT.

Adapun dasar hukum hibah terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. QS. Ali Imran 38:

هٰذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبُّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ
إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

Artinya:

“Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”. (QS. Ali Imran: 38).

- b. QS. Al Munafiqun 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ
لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ ۚ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya:

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah

dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?”. (QS. Al Munafiqun: 10).

c. QS. Al-Baqarah 177:

❦ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. al Baqarah: 177).

Menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.⁴⁶

Adapun dasar hibah dari hadits, antara lain adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 83.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم
العائد بف بئو كالكلب يقىء مث يعود بف قيئو. متفق عليه

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra dia berkata: Nabi Saw bersabda: “orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian anjing tersebut menjilati muntahannya”. (Muttafaq Alaih).

عن ابن بري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هتادوا حتابوا

Artinya:

dari Abu Hurairah ra., dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai”.

3. Macam-Macam Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, adapun pemberian hibah adalah sebagai berikut :

a. *Al-Hibah*

Yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifāyat Al-Akhyār bahwa Al-Hibah ialah : انتملك تغز عَض , artinya: "Pemilikan tanpa penggantian".

b. *Shadaqah*

Yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat. Atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.

c. *Washiat*

Yang dimaksud dengan washiat menurut pendapat Hasbi Ash-Siddieqy ialah:

عَقْدُجَةٍ تِلْ الْوَسَانِ فِ حَاتٍ تَتَزَعَا مِه مَالِ نَغْزِي تَعْذُ َوَاتٍ

artinya : "Suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya". Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diakadkan ketika hidup dan diberikan

setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua wasiat itu termasuk pemberian, untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

d. Hadiah

Yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan. Atau dalam redaksi lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.⁴⁷

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah. Adapun perbedaannya sebagai berikut :

- a. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
- b. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
- c. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
- d. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *Athiyah*.

Hibah disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah:

- a. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.
- b. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
- c. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.
- d. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.⁴⁸

⁴⁷ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 107.

⁴⁸ Muhammad Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 121.

Macam-Macam Hibah meliputi sebagai berikut :

a. Hibah *Mu'abbad*

Mu'abbad disini dimaksudkan pada kepemilikan penerima hibah terhadap barang hibah yang diterimanya. Kata *mu'abbad* sendiri dapat diartikan dengan selamanya atau sepanjang masa. Hibah dalam kategori ini tidak bersyarat, Sehingga dia mampu melakukan tindakan hukum pada barang tersebut tanpa ada batasan waktu.

b. Hibah *Mu'aqqat*

Hibah jenis *mu'aqqat* merupakan hibah yang dibatasi karena ada syarat-syarat tertentu dari pemberi hibah berkaitan dengan tempo atau waktu. Harta yang dihibahkan biasanya hanya berupa manfaat, sehingga penerima hibah tidak mempunyai hak milik sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum. Terdapat dua bentuk hibah yang bersyarat, yaitu *'umra* dan *ruqba*.

1) *Umra*

Umra merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerima hibah meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi hibah. Hal demikian berlaku dengan lafazd, aku *umrakan* barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya aku berikan kepadamu selama engkau hidup, atau ungkapan yang senada.

2) *Ruqba*

Ruqba ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada pemberi apabila penerima meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal dahulu, maka hak pemilikan tetap menjadi hak penerima.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, yang mana hibah ada beberapa macam yakni *Al-Hibah* yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan), *Shadaqah* yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat, *Wasiat* yakni pemberian seseorang kepada yang lain yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal

⁴⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 314.

dunia dan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.

C. Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama yaitu Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989⁵⁰. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hukum Acara Perdata sendiri yaitu hukum yang mengatur tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁵⁰

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu, rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut: Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun syariat Islam mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.

Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkaranya, memiliki asas-asas umum. Asas-asas Umum Peradilan agama diantaranya:

1. Asas Personalita Keislaman

Asas Personalita keislaman diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.” Selain pada pasal diatas, asas personalita keislaman juga diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Peradilan Agama memeriksa,

⁵⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2001), h. 7.

memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam”.

Apa yang tercantum dalam penjelasan sebelumnya tersebut sama dengan yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1), yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan; (b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) Wakaf dan shadaqah.”⁵¹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa asas personalita keislaman berkaitan dengan para pihak yang bersengketa harus beragama Islam dan perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkawinan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah serta hubungan hukum yang melandasi keperdataan tersebut berdasarkan Hukum Islam, sehingga cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

2. Asas Kebebasan

Asas kebebasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum.”⁵²

3. Asas Wajib Mendamaikan

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bahkan lebih sempurna dan lebih jelas rumusan yang tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: “(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak; (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.⁵³

⁵¹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 10.

⁵² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 8.

⁵³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 67.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas wajib mendamaikan adalah asas yang mengharuskan hakim untuk terus mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputuskan.

4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur pada Pasal 57 ayat (3). Pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari sederhana. Selanjutnya, maksud dan pengertian asas ini, lebih dipertegas lagi dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini bertujuan agar proses persidangan berjalan dengansederhana, cepat dan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menghabiskan biaya yang seringnya mungkin agar bisa dijangkau oleh rakyat pencari keadilan.

5. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Asas persidangan terbuka untuk umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Persidangan bersifat terbuka untuk umum”. Asas persidangan terbuka untuk umum harus dilakukan pada setiap persidangan, kalau tidak putusannya bisa berakibat tidak sah. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang, atau karena alasan penting yang harus dimuat dalam berita acara persidangan, maka sidang dilakukan dengan tertutup. Namun, untuk sidang pemeriksaan perceraian dan pembatalan perkawinan berlaku sebagai berikut Pada saat diusahakan

perdamaian, sidang terbuka untuk umum dan Jika tidak tercapai perdamaian maka sidang dilakukan dengan tertutup untuk umum, tetapi pada saat pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum.

6. Asas Legalitas dan Persamaan

Asas legalitas dan persamaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum. Di dalam asas legalitas dan persamaan terdapat dua jenis hak asasi, pertama hak asasi perlindungan hukum dan kedua hak persamaan hukum. Asas legalitas dan persamaan Peradilan Agama adalah asas yang melindungi hak asasi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum serta persamaan dalam hukum, sehingga pemeriksaan dalam persidangan berjalan tanpa membeda-bedakan orangnya.

7. Asas Aktif Memberi Bantuan

Asas aktif memberi bantuan berkaitan dengan kedudukan hakim pasif dan hakim aktif. Kedudukan pasif, hakim hanya bersifat mengawasi tata tertib jalannya persidangan, sehingga tidak ada pelanggaran tata tertib beracara, sedangkan kedudukan aktif, hakim aktif memimpin persidangan. Dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mengenai bantuan yang diberikan oleh pengadilan di sini mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan formal. Hal-hal yang berkenaan dengan masalah materiil atau pokok perkara, tidak dijangkau oleh fungsi pemberian bantuan dan nasihat. Oleh karena secara umum pemberian bantuan dan nasihat hanya meliputi masalah formal, jangkauan fungsi tersebut terutama berkenaan dengan tata cara berproses di sidang pengadilan. Uraian di atas dapat diketahui bahwa asas aktif memberi bantuan di sini adalah mengenai bantuan yang menyangkut formalitas di persidangan, seperti bantuan pembuatan surat gugatan, izin prodeo, bantuan upaya hukum, dan bantuan nasihat perdamaian.

8. Asas Manusiawi

Asas Manusiawi diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pelaksanaan Putusan Pengadilan wajib menjaga terpeliharanya perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selain asas-asas umum peradilan agama ada juga asas-asas dalam proses berperkara. Dalam proses berperkara menurut syariah, berlaku asas-asas sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang cakap bertindak dapat berperkara di pengadilan secara langsung atau dengan perantara wakilnya.
- b. Penggugat dan Tergugat harus hadir kedua-duanya serta didengar keterangannya masing-masing.
- c. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara harus dilakukan dengan patut.
- d. Perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang berperkara.
- e. Diusahakan agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan perkara mereka secara damai.
- f. Peradilan diselenggarakan secara terbuka, kecuali mengenai yang menyangkut kehormatan dan masalah keluarga.

Selain itu dapat ditambahkan, yaitu:

- a. Kekuasaan atau yuridiksi absolut maupun relatif dari suatu badan peradilan tergantung pada tauliyah dari negara.
- b. Pada dasarnya masyarakat berhak memperoleh pelayanan keadilan dari negara secara cuma-cuma.
- c. Badan peradilan hanya satu tingkat agar perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, tetapi tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan peradilan dilakukan melalui beberapa tingkat, demi tercapainya keadilan.
- d. Bila salah satu mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, sedang pihak lainnya yang membantah berkewajiban untuk membuktikannya.
- e. Peristiwa yang telah terbukti, menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
- f. Bayyinah atau alat-alat bukti menurut syariah, terdiri dari ikrar (pengakuan), persaksian, surat, qorinah atau persangkaan kuat.

g. Hakim mengadili berdasarkan hukum.⁵⁴

Setelah penjabaran asas-asas di atas, Sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama, antara lain:

1. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.
2. *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
9. Yurisprudensi.
10. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
11. Kompilasi Hukum Islam.
12. Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama.
13. Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama.
14. Kitab-kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum Tidak Tertulis lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukum acara peradilan agama adalah segala peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau bagaimana bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.

⁵⁴ Wismar Sulaikin Lubis dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 78.

D. Tinjauan Umum tentang Gugatan

Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut “hukum perdata material”. Sedangkan, hukum perdata yang mengatur bagaimanacara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut “hukum perdata formal”. Hukum perdata formal lazim disebut hukum acara perdata.⁵⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat karena manusia itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum perdata material pertama kali menentukan dan mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban itu.⁵⁶

Hukum perdata material memuat dan mengatur segala persoalan, dimana hukum perdata material merupakan sub-sub bidang hukum perdata yang termasuk hukum perdata material. Sedangkan sub-bidang mengenai melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban, termasuk dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan sub-disiplin ilmu hukum yang berdiri sendiri, hukum perdata material mengenai sebagai berikut :

1. Orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (*Personrecht*).
2. Keluarga sebagai unit masyarakat terkecil (*Familiarecht*).
3. Harta kekayaan (*Vermogensrecht*).
4. Pewarisan (*Erfrecht*).⁵⁷

Guna memulihkan dan mempertahankan hukum materiil terutama dalam hal ada pelanggaran, diperlukan perangkat hukum lainnya yang disebut hukum formil atau hukum acara. Hukum perdata

⁵⁵ C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, h. 214.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 3-4.

⁵⁷ Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), h. 8.

formil atau hukum acara perdata (*burgelijke procesrecht/civil law of procedure*) bertujuan untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Disebut formil, karena mengatur proses penyelesaian perkara perdata secara formil melalui lembaga yang berwenang (lembaga peradilan) yang dilaksanakan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perkataan acara, berarti acara (proses) penyelesaian perkara perdata tersebut haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan, dengan melalui tahap-tahap tertentu.

Adanya hukum acara perdata, masyarakat merasa ada kepastian hukum bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, bagi orang yang merasa hak perdatanya dilanggar, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eigenrichting*), tapi ia dapat menyampaikan perkaranya ke pengadilan, yaitu dengan mengajukan tuntutan hak (gugatan) terhadap pihak yang dianggap merugikannya, agar memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan menghakimi diri sendiri (*eigenrichting*). Tuntutan hak ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu permohonan dan gugatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa mengemukakan bahwa gugatan itu adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁵⁸

Menurut John Z. Loudoe mengatakan bahwa gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.⁵⁹

⁵⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 155.

⁵⁹John Z. Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material dan Hukum Acara dalam Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1991), h. 162-163.

Sementara itu, menurut Darwin Prinst dalam bukunya Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.⁶⁰

Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam perkara perdata terdapat 2 (dua) jenis gugatan, diantaranya:

1. Gugatan Permohonan (*Voluntair*)

Gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang menyatakan: “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan perdilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi *voluntair*”.⁶¹ Ciri-ciri gugatan *voluntair* diantaranya adalah:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
- b. Gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa.
- c. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.
- d. Para pihak disebut Pemohon dan Termohon.

2. Gugatan *Contentious*

Gugatan *contentious* adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Tugas dan wewenang peradil selain menerima gugatan *voluntair* namun juga menyelesaikan gugatan *contentious*. Ciri-ciri gugatan *contentious* diantaranya adalah:

- a. Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
- b. Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini.
- c. Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini.
- d. Para pihak disebut penggugat dan tergugat.⁶²

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1996), h. 15-16.

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 281.

⁶² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1994), h. 110.

Tiap-tiap orang proses perdata, dimulai dengan diajukannya surat gugatan secara tertulis bisa juga dengan lisan yang kemudian ditulis kembali atas permintaan Ketua Pengadilan Agama kepada paniteranya. Gugatan secara lisan ialah bilamana orang yang hendak menggugat itu tidak pandai menulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan dalam daerah hukum orang yang hendak digugat itu bertempat tinggal.

Setelah penggugat membuat gugatan dan diserahkan ke pengadilan maka pengadilan berkewajiban memeriksa surat gugatan tersebut bisa diterima atau tidak. Adapun alasan-alasan Pengadilan mengambil keputusan menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) adalah sebagai berikut:

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum

Gugatan yang dibuat oleh penggugat adalah tidak berdasarkan pada hukum. Hal ini biasanya terjadi pada legal standing gugatan, atau gugatan tersebut tidak ditanda tangani atau cap jempol dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Penyebab lain adalah masalah yang dipersengketakan adalah sudah terjadi sangat lampau dan sudah terselesaikan (kadaluarsa), atau masalah itu belum terjadi tapi dipersengketakan (Prematur). Menurut Affi Nurul Laily dalam Jurnal Hukumnya mengatakan bahwa *Niet Onvankelijk Verklaard (N.O.)* berarti tidak dapat diterimanya gugatan yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun beberapa kemungkinan alasan tersebut sebagai berikut :

- a. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung;
- b. Gugatan kabur (*obscuur libel*, dalil gugatan atau fundementum petendi tidak berdasarkan hukum yang jelas, gugatan yang diajukan oleh penggugat harus benar-benar ada (tidak hanya diada-ada kan saja) dan gugatan mempunyai dasar hukum yang jelas);
- c. Gugatan masih prematur;
- d. Gugatan *error in persona*;
- e. Gugatan telah lampau waktu (daluarsa);

f. Gugatan diluar yuridiksi absolut atau relatif pengadilan.⁶³

2. Gugatan *Error In Persona*

Gugatan yang salah orang atau terjadi kesalahan dalam menyebut para pihak bisa menyebabkan gugatan tidak diterima. Hal-hal yang menyebabkan *Error In Persona* diantaranya adalah:

- a. Kesalahan penggugat dalam menuliskan identitas para pihak seperti nama lengkap dan alamat tempat tinggal para pihak.
- b. Kesalahan penggugat dalam menyeret pihak lain seperti kurangnya menyebut para pihak dalam masalah waris.

3. Gugatan *Obscuur Libel*

Gugatan yang tidak jelas atau tidak terang (*Obscuur Libel*) berakibat tidak diterimanya gugatan. Kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya.
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa.
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.
- d. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
- e. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

4. Gugatan tidak sesuai kompetensi absolut dan relatif

Penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang salah dan tidak sesuai dengan kompetensi absolute dan relatif. Hal ini diatur dalam Pasal 118 HIR.

5. Gugatan *Nebis In Idem*

Gugatan yang diajukan adalah sama dengan gugatan sebelumnya dan perkaranya itu sudah diputus. Maka gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali. Dan pengadilan wajib

⁶³ Affi Nurul Laily, *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verklaard (N.O.) dalam Perkara Istbat Nikah Kumulasi Gugat Cerai (Studi Kasus Perkara Nomor :2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg)*. Jurnal Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), h. 6.

menolak atau menganggap gugatan tidak dapat diterima. Apabila gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) maka pengadilan berkewajiban memutuskan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima atau pengadilan tidak berwenang untuk mengadili.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan sampai di depan sidang pengadilan, maka di situ selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan.

⁶⁴ Jeremies Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 51.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

-----, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Abdul Aziz Dahlan,*Ensiklopedia Hukum Islam*,(Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996).

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2001).

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007).

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

-----, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005).

Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-IndonesiaTerlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).

Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Amir Syarifuddin, *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minakabau*, (Jakarta:1999, Gunung Agung).

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014).

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

Budiono,*Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya:Alumni, 2005).

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mewaris Untuk IAIN, STAI, DTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Hadis*, (Bandung: Cordoba, 2013).
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dan Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Faturraman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publisbing, 2004).
- Fachur Rahman, *Ilmu Waris Cet ke X*, (Bandung: Al-Maarif, 2014).
- Jeremies Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- John Z. Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material dan Hukum Acara dalam Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1991).
- Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1996).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1994).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Muhammad Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Muhammad Musa, Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung, 2004).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

-----, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003).

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).

Ranny Kautur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000).

Roihan Rasyid, *Hukum Acara Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2004).

Satria Effendi dan M. Zein. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, Cet. XX, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987).

Sayyid Sadiq, *Fikih Sunnah Jilid 14 (Terjemah)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997).

Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007).

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002).

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis dan Disertasi Jilid 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007).

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999).

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1994).

Wismar Sulaikin Lubis dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid III*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

B. Kamus, Jurnal dan Undang-Undang

Affi Nurul Laily, *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verklaard (N.O.) dalam Perkara Istbat Nikah Kumulasi Gugat Cerai (Studi Kasus Perkara Nomor :2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg)*. Jurnal Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Yan Pramadya Puspa. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 2008).

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen kesatu sampai dengan Amandemen keempat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgelijk Wetboek (BW)*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 0425/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor : 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.